

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	TARGET			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2024	2025	2026		
Tujuan									
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Hasil Penilaian dari Kementerian PAN RB	72	73	75	Hasil Penilaian dari Kementerian PAN RB	
Sasaran									
1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan	Hasil Penilaian dari Inspektorat atas nilai SAKIP OPD	73	75	77	Rekapitulasi capaian indikator sasaran dan program	Sekretariat

			pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.						
2. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan BMD	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Opini	Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini tersebut terdiri dari : Tidak Menyatakan Pendapat, Tidak Wajar, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Hasil penilaian dari BPK	WTP	WTP	WTP	Hasil Pemeriksaan BPK	Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, dan Bidang Aset Daerah
3. Optimalisasi Sumber-sumber Pendaptan Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	%	PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi	Pajak Daerah dibagi PAD dikali 100%	51	51	52	Realisasi Pajak Daerah terhadap PAD	Bidang PPP dan Bidang PKP

			penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Pembayaran pajak daerah juga berperan dalam penyediaan layanan publik yang penting bagi masyarakat. Layanan kesehatan, pendidikan, kebersihan lingkungan, pemadaman kebakaran, dan penegakan hukum adalah beberapa contoh layanan publik yang didukung oleh dana pajak.						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Karanganyar, 13 Januari 2024
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700510 199003 1 006